

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan keamanan Korea Selatan terhadap Korea Utara telah mengalami evolusi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir, khususnya dalam menghadapi ancaman nuklir yang terus meningkat dari Pyongyang. Pada tahun 2013, uji coba nuklir ketiga Korea Utara menandai peningkatan tajam dalam ketegangan di Semenanjung Korea, memaksa pemerintahan Presiden Park Geun-hye untuk mengambil pendekatan baru yang dikenal sebagai Trustpolitik. Kebijakan ini memadukan elemen defensif dan diplomatik, bertujuan untuk mengurangi eskalasi konflik sambil tetap memperkuat pertahanan nasional. Roh & Park (2014) menyatakan bahwa Trustpolitik menekankan pentingnya membangun kepercayaan melalui dialog multilateral, dengan tetap memegang prinsip-prinsip hukum internasional mengenai larangan senjata nuklir. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini tidak mudah, mengingat sikap Korea Utara yang keras terhadap upaya denuklirisasi. Dalam analisis Lee & Lee (2020), pengembangan nuklir oleh Korea Utara tidak semata-mata menjadi alat pertahanan, tetapi juga bagian dari strategi politik domestik untuk mempertahankan legitimasi rezim Kim Jong-un.

Salah satu aspek kunci dalam kebijakan keamanan Korea Selatan selama periode ini adalah penguatan aliansi strategisnya dengan Amerika Serikat. Penempatan sistem pertahanan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) pada tahun 2016 menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kemampuan pertahanan terhadap ancaman rudal balistik dari Korea Utara (Kim, 2018). Namun, keputusan ini memicu kontroversi, baik secara domestik maupun internasional, terutama dengan China yang melihat *Terminal High Altitude Area Defense* sebagai ancaman terhadap keamanan regionalnya. Dalam perihal domestik, kebijakan keamanan juga dipengaruhi oleh tekanan masyarakat Korea Selatan yang semakin menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap ancaman yang muncul, terutama setelah insiden penembakan di Pulau Yeonpyeong pada tahun 2010 (Sankaran & Fearey, 2017b). Insiden tersebut memperkuat persepsi

publik bahwa pendekatan militer yang tegas diperlukan untuk melindungi kedaulatan nasional.

Dinamika kebijakan keamanan Korea Selatan tidak dapat dilepaskan dari konteks regional yang kompleks. Hubungan dengan China, sebagai mitra dagang terbesar Korea Selatan, sering kali menciptakan dilema strategis. China memiliki pengaruh besar terhadap Korea Utara, tetapi lebih memilih menjaga stabilitas di Semenanjung Korea daripada mendukung upaya denuklirisasi yang dipimpin oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat (Kim & Snyder, 2019). Dalam situasi ini, Korea Selatan harus menavigasi hubungan diplomatik yang rumit dengan dua kekuatan besar sekaligus, sambil menghadapi ancaman langsung dari Korea Utara. Selain itu, ancaman keamanan non-konvensional seperti serangan siber juga semakin relevan dalam perumusan kebijakan keamanan. Misalnya, peretasan Sony Pictures oleh Korea Utara pada tahun 2014 menunjukkan meningkatnya dimensi ancaman siber terhadap keamanan nasional Korea Selatan (L.-E. Easley & Park, 2016).

Dari perspektif teoritis, kebijakan keamanan Korea Selatan mencerminkan kombinasi pendekatan realis dan liberalis. Fokus pada aliansi militer dengan Amerika Serikat serta peningkatan kemampuan pertahanan mencerminkan prinsip-prinsip realisme, yang menekankan pentingnya kekuatan militer dalam sistem internasional yang anarkis. Di sisi lain, upaya diplomasi multilateral, seperti partisipasi dalam dialog enam pihak, menunjukkan elemen liberalisme yang percaya pada kemungkinan kerjasama internasional untuk mencapai stabilitas. Namun, kombinasi kedua pendekatan ini sering kali menciptakan dilema kebijakan. Misalnya, meskipun sanksi ekonomi terhadap Korea Utara diakui secara internasional, efektivitasnya sering dipertanyakan karena kemampuan Pyongyang untuk tetap melanjutkan program nuklirnya melalui dukungan informal dari aktor-aktor internasional tertentu (Smith, 2015).

Kritik terhadap kebijakan keamanan Korea Selatan selama periode ini mencakup kurangnya fleksibilitas dalam merespons taktik Korea Utara yang berubah-ubah. Pendekatan diplomatik sering kali terhambat oleh ketidakmampuan untuk membangun kepercayaan yang nyata, sementara strategi berbasis sanksi tidak cukup untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir. Hal ini menunjukkan

perlunya inovasi dalam kebijakan keamanan, seperti meningkatkan keterlibatan dengan China atau mengeksplorasi pendekatan baru yang melibatkan elemen masyarakat sipil dalam upaya membangun perdamaian (Smith, 2015). Kompleksitas hubungan antar negara di Semenanjung Korea mencerminkan tantangan besar dalam mencapai stabilitas regional yang berkelanjutan, terutama di tengah ketegangan antara tujuan keamanan domestik dan tekanan internasional.

Ancaman nuklir Korea Utara menjadi isu yang semakin mendalam sejak uji coba nuklir pertama pada tahun 2006. Dalam dekade terakhir, Pyongyang secara konsisten meningkatkan kemampuan nuklirnya melalui berbagai uji coba yang mengarah pada pengembangan bom hidrogen dan rudal balistik antar-benua. Ancaman ini tidak hanya memengaruhi stabilitas di Asia Timur tetapi juga menciptakan ketegangan global, khususnya dalam hubungan antara Korea Utara, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya, termasuk Korea Selatan (Haggard & Noland, 2010). Diplomasi perdamaian pada tahun 2018 sempat memberikan harapan baru, tetapi keberlanjutan ancaman nuklir menunjukkan bahwa isu ini jauh dari selesai. Salah satu faktor utama yang membuat ancaman ini begitu signifikan adalah kurangnya transparansi dalam program nuklir Korea Utara. Pyongyang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai jumlah dan jenis senjata nuklir yang dimilikinya, yang menciptakan ketidakpastian global terkait kapabilitasnya (Park, 2017).

Pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara sering kali dianggap sebagai respons terhadap ancaman eksternal, khususnya dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Menurut (Lee & Lee, 2020), rezim Kim Jong-un memandang senjata nuklir sebagai satu-satunya jaminan terhadap kemungkinan invasi atau serangan militer dari kekuatan asing. Lebih dari itu, ambisi nuklir Korea Utara juga memiliki dimensi simbolik, di mana senjata nuklir menjadi alat untuk menunjukkan kekuatan dan ketahanan nasional. Dalam negeri, program nuklir digunakan sebagai propaganda untuk memperkuat legitimasi rezim Kim Jong-un di mata rakyatnya, sementara di luar negeri, ancaman ini menjadi alat tawar-menawar yang kuat dalam diplomasi internasional (Haggard & Noland, 2010).

Tantangan terbesar dalam menangani ancaman nuklir Korea Utara adalah ketidakmampuan komunitas internasional untuk secara efektif menekan Pyongyang. Meskipun berbagai sanksi telah diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Korea Utara berhasil menemukan cara untuk menghindari pembatasan ini melalui perdagangan gelap dan dukungan dari negara-negara yang tidak sepenuhnya mematuhi sanksi internasional (Kim, 2018). Ketegangan internasional yang meningkat, terutama selama pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat, memperburuk situasi. Pada tahun 2017, Korea Utara melakukan uji coba misil yang mereka klaim mampu mencapai wilayah Amerika Serikat, yang menciptakan kecemasan besar terhadap stabilitas global (Cha & Kang, 2018b). Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan sanksi ekonomi tidak cukup untuk mengatasi ancaman yang kompleks ini.

Selain ancaman langsung terhadap keamanan kawasan, program nuklir Korea Utara juga memengaruhi norma-norma internasional terkait non-proliferasi nuklir. Sebagai negara yang tidak bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), tindakan Korea Utara menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan nuklir global. Situasi ini memicu perdebatan tentang efektivitas organisasi internasional, seperti PBB, dalam mencegah proliferasi senjata nuklir (Choe, 2016). Keberadaan ancaman nuklir Korea Utara juga mendorong perlombaan senjata di kawasan Asia Timur, di mana negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang meningkatkan kerjasama militer mereka dengan Amerika Serikat sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi serangan. Namun, langkah ini sering kali menimbulkan reaksi negatif dari China, yang melihat keterlibatan militer asing di kawasan sebagai ancaman terhadap stabilitas regional.

Krisis nuklir Korea Utara juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Ketegangan di Semenanjung Korea sering kali memicu volatilitas pasar global, terutama di sektor energi dan perdagangan. Ketidakstabilan di kawasan ini dapat mengganggu jalur perdagangan internasional dan meningkatkan harga energi, yang pada akhirnya memengaruhi perekonomian global secara lebih luas (Djirimu & Tombolotutu, 2023). Selain itu, keberlanjutan ancaman nuklir Korea Utara menciptakan tantangan besar dalam membangun konsensus internasional untuk

menanganinya. Negara-negara dengan kepentingan yang berbeda, seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, sering kali memiliki pandangan yang bertentangan tentang bagaimana mengatasi masalah ini. Ketidaksepakatan ini semakin mempersulit upaya diplomatik untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Dalam jangka panjang, ancaman nuklir Korea Utara memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan holistik untuk mencapai solusi. Hal ini mencakup kombinasi langkah-langkah militer, diplomasi, dan upaya untuk mengurangi ketergantungan Pyongyang pada ekonomi informal. Meskipun tantangan ini sangat kompleks, keberhasilan dalam menangani ancaman ini akan menjadi langkah penting menuju stabilitas yang lebih besar di Asia Timur dan sistem internasional secara keseluruhan.

Penelitian mengenai dinamika kebijakan keamanan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor domestik dan internasional. Dalam kajian terdahulu, beberapa fokus penelitian telah diidentifikasi, baik secara teoretis maupun empiris. Penelitian oleh Iriawan (2017) menekankan pada reformasi aliansi pertahanan trilateral antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan untuk menghadapi ancaman Korea Utara, dengan pendekatan keamanan kawasan. Gallup Korea (2016) di sisi lain, mengkaji dampak kebijakan Presiden Park Geun-hye terhadap opini publik dalam perjanjian *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)*, menggunakan *prospect theory* untuk menjelaskan pengambilan risiko dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan.

Lembaga seperti The ASAN Institute for Policy Studies (2016) memberikan perspektif geopolitik tentang bagaimana sentimen domestik memengaruhi kerja sama internasional, terutama terkait isu sejarah antara Korea Selatan dan Jepang. Editorial oleh Chosun Ilbo (2016) mengambil sudut pandang konservatif, menegaskan pentingnya kerja sama trilateral sebagai langkah realistis untuk melawan ancaman regional. Sebaliknya, (Hankyoreh, 2015) menyajikan perspektif progresif, menyoroti pentingnya kemandirian strategis dan pengurangan ketergantungan pada sekutu tradisional seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Penelitian yang dilakukan oleh Iriawan (2017) berfokus pada reformasi aliansi pertahanan trilateral antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan sebagai respons terhadap ancaman nuklir yang terus berkembang dari Korea Utara. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama strategis di antara ketiga negara tersebut, mengingat posisi geopolitik mereka yang sangat vital dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Timur. Ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir Korea Utara dipandang sebagai tantangan langsung tidak hanya bagi keamanan regional tetapi juga bagi aliansi tradisional yang dibangun Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya di Asia. Dalam penelitian ini, Iriawan menggarisbawahi bagaimana reformasi aliansi ini menjadi sangat mendesak, terutama setelah serangkaian uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara pada periode 2016–2017. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana ketiga negara mengkoordinasikan strategi pertahanan mereka untuk menghadapi ancaman nuklir, termasuk melalui peningkatan latihan militer bersama, pembagian informasi intelijen, serta penguatan kebijakan keamanan kolektif. Iriawan juga menggunakan pendekatan keamanan kawasan untuk menganalisis peran Amerika Serikat sebagai hegemon dalam aliansi ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan aliansi trilateral ini tidak hanya bergantung pada kekuatan militer tetapi juga pada kepercayaan politik dan komitmen diplomasi di antara ketiga negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Gallup Korea (2016b) menyoroti dampak perjanjian General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) terhadap opini publik di Korea Selatan, khususnya dalam konteks ancaman nuklir Korea Utara. GSOMIA adalah sebuah perjanjian berbagi informasi militer antara Korea Selatan dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kedua negara dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal balistik dari Korea Utara. Namun, perjanjian ini memicu kontroversi di Korea Selatan karena sejarah panjang konflik politik dan budaya antara kedua negara. Dalam penelitian ini, Gallup Korea menggunakan survei nasional untuk mengukur bagaimana publik Korea Selatan merespons GSOMIA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Korea Selatan berusaha mempromosikan GSOMIA sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keamanan nasional, banyak warga Korea Selatan yang merasa

skeptis terhadap kerja sama dengan Jepang. Sikap negatif ini sebagian besar dipengaruhi oleh isu sejarah, termasuk perselisihan terkait masa penjajahan Jepang atas Korea pada awal abad ke-20. Penelitian ini juga menggunakan kerangka *prospect theory* untuk menganalisis bagaimana ketidakpastian keamanan memengaruhi persepsi risiko di kalangan masyarakat Korea Selatan. Kesimpulannya, meskipun GSOMIA secara strategis penting, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan publik yang masih terbagi.

Penelitian yang dilakukan oleh ASAN Institute (2016) berfokus pada dinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang serta bagaimana opini publik memengaruhi kerja sama keamanan kedua negara. Penelitian ini menyoroti bahwa hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang sering kali dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti politik dalam negeri dan persepsi masyarakat terhadap negara tetangga. Penelitian ini menggunakan data survei dari ASAN Institute untuk memahami bagaimana isu-isu sejarah, seperti perjanjian terkait kompensasi *comfort women*, memengaruhi hubungan diplomatik dan militer kedua negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ancaman nuklir Korea Utara menjadi faktor yang mendorong kerja sama antara Korea Selatan dan Jepang, persepsi negatif masyarakat terhadap Jepang sering kali menjadi penghalang. Salah satu temuan penting adalah bahwa masyarakat Korea Selatan cenderung melihat Jepang lebih sebagai ancaman ekonomi dan sejarah dibandingkan sebagai sekutu strategis. Dalam hal ini, penelitian ASAN Institute memberikan wawasan bahwa keberhasilan kerja sama keamanan tidak hanya membutuhkan dukungan pemerintah tetapi juga keselarasan persepsi publik.

Penelitian Lee (2020) mengkaji pengaruh sistem pertahanan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) terhadap stabilitas strategis di Asia Timur. THAAD, yang dikerahkan oleh Amerika Serikat di Korea Selatan, dirancang untuk menghadapi ancaman rudal balistik dari Korea Utara. Namun, implementasi THAAD memicu reaksi keras dari negara-negara tetangga, termasuk China dan Rusia, yang menganggap sistem ini sebagai ancaman terhadap keseimbangan strategis regional. Penelitian Lee menggunakan pendekatan geopolitik untuk menganalisis dampak THAAD terhadap hubungan internasional di Asia Timur.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun THAAD berhasil memperkuat pertahanan Korea Selatan, keberadaannya menciptakan ketegangan diplomatik dengan China, yang merespons dengan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana keberadaan THAAD mengubah dinamika keamanan kawasan, dengan negara-negara seperti Rusia meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Asia Timur. Kesimpulannya, meskipun THAAD efektif secara militer, keberhasilannya dalam jangka panjang sangat bergantung pada pengelolaan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Park (2017) berfokus pada resistensi publik terhadap implementasi THAAD di Korea Selatan. Dalam penelitian ini, Park menyoroti bagaimana isu-isu domestik, seperti dampak ekonomi dan lingkungan, memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pertahanan nasional. Data survei yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak warga Korea Selatan merasa tidak nyaman dengan kehadiran THAAD, terutama di wilayah tempat sistem ini dipasang. Park juga menekankan bahwa resistensi publik sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, seperti sikap partai oposisi yang menggunakan isu THAAD sebagai alat kritik terhadap pemerintah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa narasi yang dibangun oleh media massa juga memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi publik. Dalam kesimpulannya, Park menyarankan agar pemerintah Korea Selatan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk mengurangi ketidakpercayaan dan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan pertahanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cha & Kang (2018) membahas perdebatan mengenai strategi keterlibatan diplomasi dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Penelitian ini berfokus pada dua pendekatan utama: pendekatan konfrontatif, seperti sanksi ekonomi dan tekanan militer, serta pendekatan kooperatif, seperti dialog dan diplomasi. Cha dan Kang menggunakan analisis historis untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan strategi keterlibatan di masa lalu, termasuk Six-Party Talks. Mereka menemukan bahwa meskipun pendekatan kooperatif memiliki peluang untuk menurunkan ketegangan, keberhasilannya sering kali terhambat oleh ketidakpercayaan antara Korea Utara dan negara-negara

lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi strategi konfrontatif dan kooperatif diperlukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi denuklirisasi Korea Utara.

Penelitian Liu (2021) menganalisis respons China terhadap implementasi THAAD di Korea Selatan. Liu berpendapat bahwa keberadaan THAAD tidak hanya dipandang sebagai langkah defensif oleh Korea Selatan tetapi juga sebagai ancaman strategis oleh China. Hal ini disebabkan oleh kemampuan radar THAAD yang dapat memantau aktivitas militer China di wilayahnya. Dalam penelitian ini, Liu menyoroti bagaimana China merespons dengan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik terhadap Korea Selatan. Liu juga menggunakan kerangka teori security dilemma untuk menjelaskan bagaimana tindakan defensif satu negara dapat menciptakan ketidakstabilan karena dianggap agresif oleh pihak lain. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi THAAD telah memperburuk hubungan Korea Selatan dan China, meskipun dirancang untuk meningkatkan keamanan Korea Selatan. Penelitian Ivanov (2018) membahas perspektif Rusia terhadap penempatan THAAD di Korea Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia menganggap THAAD sebagai bagian dari strategi Amerika Serikat untuk mengepung Rusia di kawasan Asia Timur. Ivanov menggunakan pendekatan geopolitik untuk menganalisis bagaimana THAAD memengaruhi strategi keamanan Rusia. Penelitian ini menemukan bahwa Rusia merespons dengan meningkatkan kerja sama militernya dengan China dan memperkuat kehadiran militernya di wilayah Pasifik. Ivanov menyimpulkan bahwa keberadaan THAAD telah mendorong Rusia untuk mengambil langkah-langkah yang lebih agresif dalam melindungi kepentingan strategisnya di Asia Timur.

Penelitian Moon (2019) membahas tantangan yang dihadapi dalam upaya integrasi dan rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Korea Utara di tengah ancaman nuklir yang terus berlanjut. Penelitian ini menyoroti bagaimana ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea tidak hanya disebabkan oleh ancaman eksternal dari Korea Utara, tetapi juga oleh dinamika politik internal di kedua negara. Moon menggunakan pendekatan historis dan analisis kebijakan untuk mengkaji berbagai upaya rekonsiliasi, termasuk Sunshine Policy yang pernah diterapkan oleh Korea

Selatan pada awal 2000-an. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan utama dalam proses integrasi, seperti perbedaan ideologi politik, ketidakpercayaan yang mendalam, dan kurangnya dukungan publik terhadap kebijakan pro-rekonsiliasi. Selain itu, Moon menekankan bahwa tantangan ekonomi juga menjadi faktor penting, mengingat tingginya biaya yang diperlukan untuk mengintegrasikan ekonomi kedua Korea. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun integrasi penuh mungkin sulit dicapai dalam waktu dekat, langkah-langkah kecil seperti peningkatan hubungan budaya dan ekonomi dapat menjadi fondasi bagi perdamaian jangka panjang.

Penelitian C. H. Park (2019) mengkaji bagaimana kebijakan keamanan Korea Selatan berperan dalam menghadapi ketegangan nuklir di Asia Timur. Park berpendapat bahwa ancaman nuklir Korea Utara telah menjadi faktor utama yang mendorong Korea Selatan untuk memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat dan meningkatkan kemampuan militernya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan publik untuk menganalisis berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah Korea Selatan, termasuk implementasi sistem THAAD, modernisasi angkatan bersenjata, dan kerja sama trilateral dengan Jepang dan Amerika Serikat. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Korea Selatan dalam menyeimbangkan antara memperkuat pertahanan nasional dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga seperti China dan Rusia. Park mencatat bahwa meskipun aliansi dengan Amerika Serikat memberikan perlindungan yang signifikan, kebijakan ini sering kali memicu reaksi negatif dari China, yang menganggap Korea Selatan sebagai bagian dari strategi AS untuk mengepungnya. Dalam kesimpulannya, Park menekankan bahwa Korea Selatan perlu mengembangkan kebijakan yang lebih independen dan proaktif untuk mengelola ketegangan regional sambil tetap mempertahankan keamanan nasional.

Tabel 2. 1 Literature Review

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan	
1	Reformasi Pertahanan	Aliansi AS-	Iriawan (2017)	Fokus pada aliansi trilateral untuk keamanan kawasan	Menggunakan pendekatan untuk

	Jepang-Korsel Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara		menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.	menganalisis peran AS sebagai hegemon.
2	Dampak Kebijakan GSOMIA terhadap Opini Publik di Korea Selatan	Gallup Korea (2016a)	Membahas kebijakan keamanan Korea Selatan sebagai respons terhadap ancaman nuklir.	Menggunakan kerangka prospect theory untuk memahami pengambilan risiko dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan.
3	Public Opinion on South Korea-Japan Relations	ASAN Institute (2016)	Menyoroti pengaruh faktor domestik terhadap kebijakan keamanan internasional Korea Selatan.	Fokus pada dampak isu sejarah terhadap kerja sama Korea Selatan dan Jepang.
4	THAAD and Strategic Stability in Asia	Lee (2020)	Membahas implementasi THAAD sebagai respons terhadap ancaman rudal Korea Utara.	Menganalisis bagaimana THAAD memengaruhi stabilitas strategis di kawasan Asia Timur.
5	Public Opposition to THAAD in South Korea	Park (2017)	Menyoroti resistensi publik terhadap kebijakan keamanan Korea Selatan.	Fokus pada dampak domestik dari implementasi THAAD, termasuk reaksi masyarakat di wilayah pemasangan sistem.
6	Nuclear North Korea: A Debate on Engagement Strategies	Cha & Kang (2018)	Membahas ancaman nuklir Korea Utara terhadap stabilitas regional dan global.	Menyoroti strategi diplomasi dan dialog dalam meredakan ketegangan nuklir.
7	China's Response to THAAD: A Strategic Analysis	Liu (2021)	Menganalisis dampak kebijakan THAAD terhadap hubungan internasional di Asia Timur.	Fokus pada perspektif China terhadap sistem THAAD sebagai ancaman keamanan regional.
8	Russia's View on THAAD Deployment in South Korea	Ivanov (2018)	Membahas reaksi negara-negara besar terhadap implementasi	Fokus pada pandangan Rusia terhadap THAAD sebagai bagian dari strategi

			THAAD di Korea Selatan.	Amerika Serikat untuk mengepung Rusia di Asia Timur.
9	Inter-Korean Relations: Challenges of Integration and Reconciliation	Moon (2019)	Menyoroti hubungan Selatan dan Utara di bawah bayang-bayang nuklir.	Mengkaji tantangan integrasi dan rekonsiliasi dalam konteks hubungan antar-Korea.
10	Nuclear Tensions in East Asia: The Role of South Korea's Security Policies	Park (2019)	Membahas kebijakan Korea terhadap nuklir Korea Utara.	respons keamanan Selatan terhadap ancaman ketegangan nuklir di Asia Timur. Fokus pada analisis kebijakan keamanan Korea Selatan dalam konteks ketegangan nuklir di Asia Timur.

Sumber : Diolah oleh penulis, 2025

Tabel 2.1 memberikan tinjauan literatur mengenai berbagai perspektif terkait kebijakan keamanan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara serta dinamika regional yang menyertainya. Studi-studi yang diulas mencakup beragam fokus, mulai dari aliansi trilateral AS-Jepang-Korea Selatan (Iriawan, 2017) hingga dampak domestik kebijakan seperti THAAD (Lee, 2020; Park, 2017) dan GSOMIA (Gallup Korea, 2016a). Selain itu, penelitian lain membahas perspektif internasional, seperti respons China dan Rusia terhadap implementasi THAAD (Ivanov, 2018; Liu, 2021), menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya melibatkan dinamika bilateral, tetapi juga memengaruhi stabilitas kawasan secara luas. Penelitian seperti Cha & Kang (2018) dan Moon (2019) lebih menekankan pada strategi diplomasi dan tantangan rekonsiliasi antar-Korea, sementara analisis lainnya, seperti yang dilakukan oleh ASAN Institute (2016) dan Park (2019), menggarisbawahi peran opini publik dan kebijakan domestik dalam membentuk respons keamanan nasional. Dengan demikian, tinjauan ini menggambarkan kompleksitas dan multidimensionalitas ancaman nuklir Korea Utara terhadap keamanan regional dan internasional, serta respons kebijakan yang mencerminkan kombinasi faktor domestik dan geopolitik.